



Seorang guru menunjukkan koleksi buku bacaan di pojok baca sekolah di Kalimantan Utara. Inisiatif pojok baca ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam menumbuhkan budaya baca sejak dulu. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kota Tarakan

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Timor Tengah Utara: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kota Tarakan menguasai kemampuan dasar dengan cukup baik. Namun, murid perempuan memiliki capaian lebih tinggi dari murid laki-laki. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kota Tarakan meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan di sekolah, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sistematis.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kota Tarakan untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan efektif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan, serta (4) memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 53,8; perempuan 56,24

Numerasi : Laki-laki 39,38; perempuan 42,5

Masing-masing skor tersebut lebih tinggi sekitar 4-5 poin dari nilai rata-rata provinsi. Namun, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kota Tarakan, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kota Tarakan pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Sebanyak 1-4 dari 10 murid merasa tidak aman dari kekerasan di sekolah (Kemendikbud, 2024). Mayoritas kasus kekerasan berupa perundungan (*bullying*) dan terjadi antarmurid. Mereka umumnya belum memahami definisi dan cakupan kekerasan, sehingga belum bisa membedakan tindakan yang benar dan salah.

Sejumlah murid juga menjadi korban kekerasan seksual di luar sekolah—sering dilakukan oleh anggota keluarga. Selain itu, posisi Kota Tarakan sebagai kota transit meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Misalnya, timbal balik atas insentif finansial (uang, pulsa, dan ponsel) yang diberikan pelaku pada korban. Namun, banyak orang tua tidak melaporkan kasus kekerasan seksual karena malu, membuat pelaku tidak dihukum secara tegas.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 662 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 1% tidak sekolah dan 99% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (53%), sekolah inklusi (8%), atau sekolah luar biasa/SLB (38%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun masih sangat kuat di masyarakat, sehingga mereka sering dirundung dan dikucilkan.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kota Tarakan mencapai 103,14 dari 250. Angka tersebut lebih rendah dari indeks Kalimantan Utara (148,16) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Meski begitu, menurut IRBI, Kota Tarakan tetap berisiko sedang mengalami tsunami. Pada akhir 2024, kota ini juga mengalami banjir dan tanah longsor parah serta terdampak asap kebakaran hutan.

Sekolah dan masyarakat telah melakukan langkah mitigasi dan adaptasi secara mandiri. Misalnya, mengintegrasikan materi perubahan iklim dalam kurikulum, hemat listrik dan air, menanam pohon, serta mendaur ulang sampah. Namun, masih ada perilaku dan kebiasaan yang merusak lingkungan, seperti komunitas di kawasan pesisir membuang sampah ke laut. Pemerintah pun belum menerapkan langkah yang lebih sistematis dan jangka panjang.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan dan disabilitas

Kemiskinan menghambat akses anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan karena keluarga tidak mampu membiayai perawatan kesehatan dan fasilitas pendukung.



Kepercayaan adat dan disabilitas

Kepercayaan adat/budaya membuat orang tua mencari bantuan tetua adat atau pemimpin agama untuk menangani anak penyandang disabilitas, bukan bantuan medis.



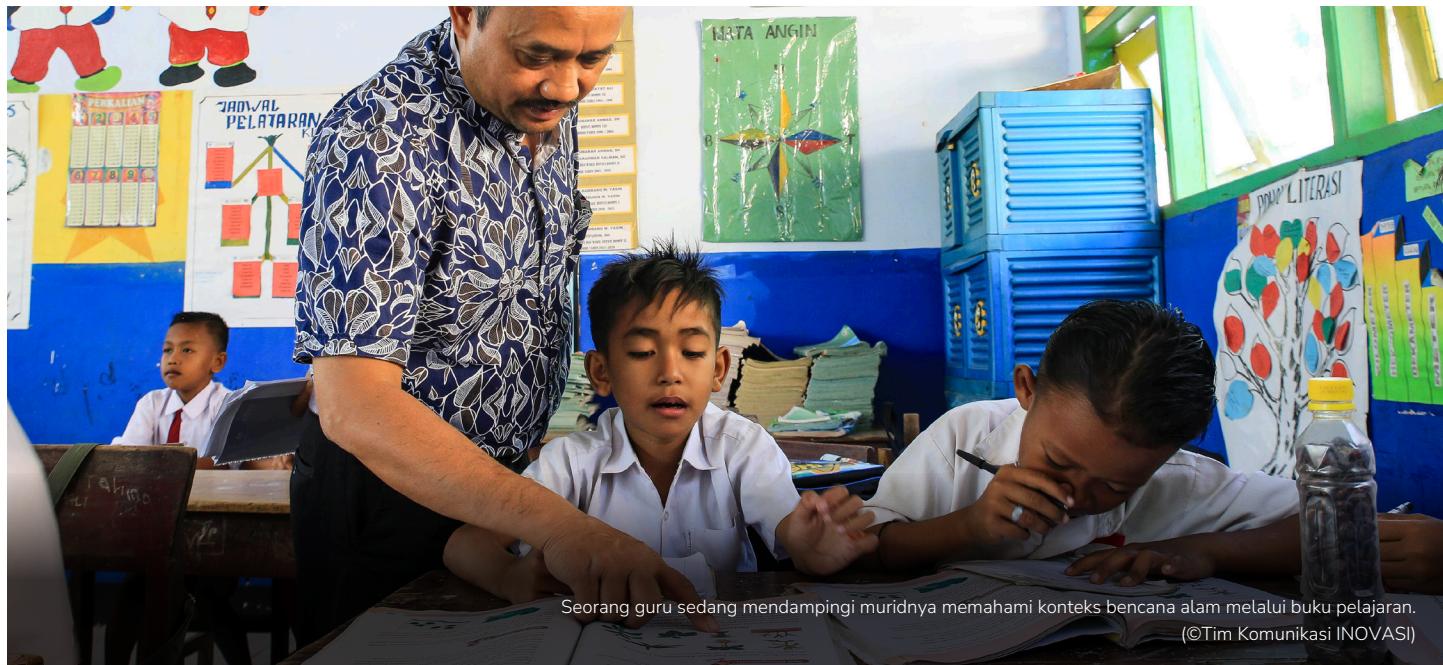
Gender dan perubahan iklim

Pada kejadian bencana alam dan dampak perubahan iklim, orang tua lebih mementingkan keamanan anak perempuan, sementara anak laki-laki dianggap lebih mandiri.



Stunting dan disabilitas

Stunting dapat meningkatkan risiko disabilitas pada anak, sehingga sosialisasi informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas perlu dilakukan sejak orang tua akan menikah.



Seorang guru sedang mendampingi muridnya memahami konteks bencana alam melalui buku pelajaran.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kota Tarakan untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan agar semakin responsif dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi pendidikan karakter dalam kurikulum serta melanjutkan sistem pelaporan dan penanganan kekerasan yang sudah berjalan baik.
2. Mengaplikasikan kebijakan dan praktik baik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat nasional dan provinsi sebagai kebijakan, rencana, dan program kegiatan di tingkat kota dan kabupaten. Lalu, melakukan sosialisasi kebijakan dan program tersebut, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat maupun melalui media digital.



**Dinas Pendidikan & Dinas Sosial:
Mendorong pemenuhan pelayanan
dan akomodasi yang layak bagi murid
penyandang disabilitas**

1. Melakukan sosialisasi
Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak (AYL) untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Langkah ini bertujuan menjamin semua sekolah menerima murid penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard Profil Belajar Siswa (PBS)*, yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kota agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



**Dinas Lingkungan Hidup:
Menerapkan kebijakan dan program mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim yang lebih
berdampak signifikan**

1. Mengupayakan penerapan peraturan daerah atau peraturan wali kota tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara konsisten. Peraturan tersebut meliputi pemberian sanksi atas kegiatan yang merugikan alam serta perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan, tahan bencana, dan berkelanjutan.
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merancang skema evakuasi bencana yang memadai. Langkah ini mendorong masyarakat untuk memiliki kesiapsiagaan, mampu merespons bencana, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan secara langsung ke masyarakat di daerah terpencil. Dengan begitu, kebijakan dan program tersebut bisa dipahami masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku mereka.



Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda Litbang: Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penerapan kebijakan dan pemberian dukungan (terutama bagi murid penyandang disabilitas dan murid korban kekerasan) dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran